

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

**A. Konsep Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat dalam Perspektif  
Abuddin Nata**

## 1. Definisi Pendidikan Berbasis Masyarakat secara umum

Menurut Pemikiran Abuddin Nata, dijelaskan bahwa Pendidikan yang Berbasis Masyarakat yaitu pendidikan yang menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek pendidikan. Untuk itu terdapat sejumlah langkah yang harus ditempuh.

*Pertama*, membentuk perhimpunan masyarakat peduli pendidikan yang tugasnya antara lain menyediakan mendukung pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di masyarakat dengan cara memberikan bantuan moril maupun material pada setiap usaha pendidikan, mengawasi berjalannya kegiatan pendidikan, mengawasi peserta didik, ikut aktif dalam komite sekolah / madrasah, dan sebagainya. *Kedua*, menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh pendidikan, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan bermutu tinggi. *Ketiga*, membersihkan lingkungan masyarakat dari berbagai hal yang dapat mengganggu kelancaran jalannya pendidikan, atau merusak moral dan akhlak peserta didik. *Keempat*, membantu tumbuhnya atmosfer pendidikan, seperti



Pemikiran Nata di atas dapat diperkuat dengan pendapat dari Nasution (1999) yang dikutip Abdullah Idi dalam bukunya *Sosiologi Pendidikan, Individu, Masyarakat dan Pendidikan* dikatakan

<sup>3</sup>Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (UU RI No.2 Th. 1989) dan Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Cet. IV, 3.

Maka dapat disimpulkan, bahwa konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan suatu strategi memberdayakan dan menggali potensi yang ada di masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya untuk disinergikan dengan pelaksanaan pendidikan. Konsep ini mengharuskan adanya lembaga pendidikan tidak lagi eksklusif atau mengisolasi diri dari masyarakat, melainkan ia harus inklusif dan berintegritas dengan masyarakat. Dalam kaitan ini masyarakat tidak

<sup>5</sup> Jauhar, *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*...., Ibid., h.190.







berakibat menjatuhkan martabatnya. Kepada peserta didik harus diberitahukan, bahwa kedudukan sebagai raja, pejabat, orang kaya dan derajat lainnya sesungguhnya tidak permanen, atau bisa datang dan pergi, sedangkan pandangan bahwa manusia sebagai bersaudara dan antara satu dan lainnya saling membutuhkan merupakan hal yang abadi. Untuk itu kepada anak didik yang memiliki latar belakang status sosial yang demikian itu harus diberi tahu, bahwa bergaul dengan semua orang termasuk dengan yang status sosialnya lebih rendah itu adalah lebih baik daripada menjaga rasa egonya itu. Kepada mereka juga harus diberi tahu, bahwa status mereka yang demikian itu sesungguhnya lahir karena adanya masyarakat yang lebih rendah daripada derajatnya. Seorang raja barulah dianggap raja kalau ada rakyat yang dipimpinnya. Seorang pejabat pun sesungguhnya diangkat dan digaji oleh rakyat; orang yang kaya raya sesungguhnya juga terjadi disebabkan karena bantuan rakyat. Islam menganjurkan agar manusia melakukan proses sosialisasi. Misalnya terdapat dalam ayat berikut ini:



خَيْرٌ عِلْمٍ اللَّهُ إِنْ اتَّقَيْتُمْ اللَّهَ

## 2) Masyarakat sebagai Kontrol Sosial

<sup>8</sup>Ibid., h. 62.

رُفُويَا مُرُونِ الْخَيْرِ إِلَى يَدِ عُونِ أُمَّةٍ مِّنْكُمْ وَلَتَكُنْ  
..... الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِاللَّع

Dengan demikian, menasihati atau melakukan kontrol sosial adalah merupakan salah satu peran yang dilakukan oleh masyarakat.

Budaya sebagaimana dipahami adalah nilai-nilai, ajaran, aturan, atau norma yang tumbuh, hidup, dan berkembang di

[illegible]



#### 4) Masyarakat sebagai Seleksi Pendidikan

<sup>11</sup> Ibid., h. 66.

memilih dan memanfaatkan apa saja yang ada di masyarakat untuk keperluan pendidikan.

Penggunaan berbagai hal yang ada di masyarakat sebagaimana disebutkan di atas oleh Nata, telah menjadi bahan pemikiran berbagai tokoh pendidikan untuk membangun teori dan konsep pendidikan. John Dewey sebagai pengembang teori belajar *progressive* misalnya bertitik tolak dari pandangan bahwa ukuran sebuah lembaga pendidikan yang baik, adalah apabila lulusannya dapat berguna dan dibutuhkan masyarakat. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat menghasilkan orang-orang yang dapat hidup di masyarakat. Untuk itu, maka masyarakat tidak lagi dapat dilihat sebagai objek pendidikan, melainkan sebagai subjek. Dalam konteks inilah, masyarakat bertindak sebagai penyeleksi pendidikan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, maka Nata memberikan pernyataan bahwa seorang siswa tidak lagi cukup hanya belajar di dalam kelas yang dibatasi oleh dinding sekolah saja melainkan seorang siswa harus pula belajar di masyarakat. Caranya dapat dilakukan dengan mengajak peserta didik berkomunikasi, berinteraksi dan berintegrasi dengan masyarakat. Cara ini dapat dilakukan melalui program *home stay*. Yaitu peserta didik diprogram hidup di masyarakat dan melakukan berbagai aktivitas di masyarakat. Hingga peserta

<sup>13</sup> Ibid., h. 68.

a. Visi dan Orientasi Pendidikan Islam

### b. Prinsip-prinsip Pendidikan Islam

<sup>14</sup> Abuddin Nata, *MANAJEMEN PENDIDIKAN : Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012), Cet. Ke-5, h. 97-99.

[illegible]



infrastruktur, peralatan, dan media pengajaran, sumber daya manusia, keamanan, dan kenyamanan lingkungan, pembiayaan, pengguna lulusan, dan sebagainya. Semua kebutuhan pendidikan tersebut baru terwujud apabila mendapatkan dukungan dari semua pihak.



Berbagai kebutuhan pendidikan tersebut berada di masyarakat dalam arti seluas-luasnya, termasuk masyarakat pemilik kekuasaan, pengambil kebijakan, pemilik modal, pemilik industri, penyalur tenaga kerja, pemilik ilmu dan keahlian dan sebagainya. Prinsip pendidikan yang berbasis masyarakat adalah prinsip yang menekankan keterlibatan semua unsur dalam masyarakat, melalui program kerja sama, kemitraan, patungan, dan sebagainya. Prinsip pendidikan yang berbasis masyarakat ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan, bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, orang tua dan masyarakat. Di dalam sejarah terdapat fakta yang menunjukkan bahwa munculnya berbagai lembaga pendidikan yang bervariasi, serta adanya muatan lokal dalam kurikulum pendidikan, karena adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Dengan prinsip yang berbasis masyarakat ini, maka pemerintah perlu menumbuhkan inisiatif dan kreativitas masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Prinsip ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam tentang kerja sama dan



Adapun kaitannya dengan Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat, Nata mengutip pendapat dari Muhammad Fadhil al-Jamali yang merumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam empat macam yaitu (1) mengenalkan manusia akan perannya di antara sesama makhluk dan tanggung jawabnya dalam hidup ini; (2) mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat; (3) mengenalkan manusia akan alam dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberi kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat darinya, dan (4) mengenalkan manusia akan penciptaan alam (Allah) dan menyuruhnya beribadah kepada-Nya. Pada rumusan tujuan yang dikemukakan Muhammad Fadhil al-Jamali ini disebutkan istilah sosial atau masyarakat dan tanggung

Adapun kaitannya dengan Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat, Nata mengutip pendapat dari Muhammad Fadhil al-Jamali yang merumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam empat macam yaitu (1) mengenalkan manusia akan perannya di antara sesama makhluk dan tanggung jawabnya dalam hidup ini; (2) mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat; (3) mengenalkan manusia akan alam dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberi kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat darinya, dan (4) mengenalkan manusia akan penciptaan alam (Allah) dan menyuruhnya beribadah kepada-Nya. Pada rumusan tujuan yang dikemukakan Muhammad Fadhil al-Jamali ini disebutkan istilah sosial atau masyarakat dan tanggung





lingkungan, mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Secara umum, pendidikan yang masih mengharapkan bantuan dari atas, selalumenpengaruhi kinerja sistem penyelenggaraan di sekolah. Dengankembali kepada 'mental' swasta diharapkan mampu meningkatkan kemauan, kemampuan, ketrampilan dan strategi dalam menggali sumber-sumber yang ada di masyarakat.Dengan demikian, sudah seharusnya masyarakat diberikan ruang yanglayak untuk mengelola, menilai dan menikmatinya. Masyarakat diberi ruang partisipasiyang luas, agar institusi penyelenggara pendidikan memperoleh dukungan dan mendapat legitimasi sosial.

1) Hambatan

*Pertama*, dunia pendidikan pada umumnya sudah terbiasa dengan bantuan dari pemerintah. Berbagai masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan seperti keterbatasan dana, gedung tempat berlangsungnya pendidikan, peralatan

*Kedua*, secara umum ekonomi masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, sebagai akibat sulitnya lapangan kerja, tidak mampu bersaing, serta kurangnya kemampuan untuk memperbaiki ekonominya. Dalam keadaan yang demikian, amat sulit diharapkan adanya partisipasi ekonomi masyarakat dalam mendukung konsep pendidikan berbasis masyarakat.

[illegible]



Di samping adanya hambatan sebagaimana disebutkan di atas, terdapat pula faktor dukungan yang dapat memperlancar pelaksanaan konsep pendidikan berbasis masyarakat. Dukungan tersebut, sedikitnya ada tiga sebagai berikut.

*Kedua*, bahwa dari sekian puluh juta masyarakat Indonesia yang beragama Islam, sudah banyak yang tergolong mampu dan berkecukupan dengan berbagai keahlian dan profesi yang beragam. Di antara mereka ada yang tergolong sebagai pengusaha besar yang berhasil, pejabat pemerintah yang memiliki kedudukan tinggi dan strategis, cendekiawan yang

[illegible]

*Ketiga*, di kalangan masyarakat Islam sendiri saat ini sudah banyak yang berhasil menyelenggarakan pendidikan secara mandiri dengan hasil yang dapat dibanggakan. Banyak lembaga pendidikan Islam swasta yang cukup memiliki kredibilitas dan markatabel. Keadaan yang demikian itu dapat mendukung pelaksanaan konsep pendidikan berbasis masyarakat, manakala mereka mau membantu lembaga-lembaga pendidikan islam lainnya yang belum maju.

[illegible]

Dari keseluruhan uraian tersebut, Nata menyimpulkan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan kesepakatan pada umumnya ahli pendidikan. Konsep tersebut pada intinya adalah pendidikan harus dikelola secara demokratis dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, yakni pemerintah, sekolah dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya termasuk kalangan masyarakat industri, pengusaha, pengacara, dokter, birokrat, dan seterusnya atas dasar tanggung jawab moral dan panggilan niat semata-mata karena Allah. Dengan dasar tanggung jawab dan niat yang demikian itu, maka pelaksanaan konsep pendidikan berbasis masyarakat tersebut dengan sendirinya akan terlaksana. Pelaksanaan konsep ini dapat dinilai sebagai terobosan baru untuk merubah keadaan masyarakat yang selama ini hanya menunggu dikasihani, daripada merubah keadaannya sendiri. Mereka harus berani merubah sikap (hijrah mental) dan berkorban (jihad) demi pendidikan putera-puteri bangsa, sebagai panggilan iman yang tertanam di dalam jiwanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. sebagai berikut:

[illegible]

Artinya : “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi derajatnya di sisi Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.” (Q.S. at-Taubah [9]: 20).<sup>23</sup>

## 1. Definisi Pendidikan Life Skill

<sup>23</sup> Ibid., h. 190.

Untuk menumbuhkan potensi anak secara optimal berdasarkan karakteristik perkembangan usia psikologisnya, pendidikan Life Skills berperan besar dalam menegaskan fungsi kemanusiaan anak didik secara fitrah sebagai pribadi utama yaitu menjadikan anak didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta trampil mengelola potensi-potensi dirinya dalam kehidupan. Pendidikan Life Skills merupakan pendidikan yang orientasi dasarnya membekali keterampilan peserta didik yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap yang didalamnya termasuk fisik dan mental, serta kecakapan kejuruan yang berkaitan dengan pengembangan akhlak peserta didik sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup dalam kehidupan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam* ,....Ibid., h. 71.

<sup>25</sup> Ibnu Hadjar, dkk., *Jurnal Pendidikan Islam Vol 6, Nomor 2*, (Semarang: Fakultas yahIAIN Walisongo, 2012), h. 280-281.

Jadi, sehubungan dengan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal ini masyarakat memiliki peranan yang amat besar dalam proses pendidikan karena masyarakatlah tempat peserta didik menimba berbagai pengalaman yang dapat memperkuat kemampuan kognitif, afektif dan psikomotoriknya; kemampuan fisik, pancaindra, akal pikiran, hati nurani (moral) dan spiritualnya. Masyarakatlah tempat peserta didik mematangkan sikap dan kepribadiannya yang selanjutnya dapat menjadi bekal berharga dalam kehidupannya di masa depan.

Departemen Pendidikan Nasional membagi life skills (kecakapanhidup) menjadi empat jenis, yaitu: (a) Kecakapan personal (personal skill) yang mencakup kecakapan mengenal diri (self awareness) dan kecakapanberpikir rasional (thinking skill), (b) Kecakapan sosial (social skill), (c)Kecakapan akademik (academic skill), dan (d) Kecakapan vokasional(vocational skill) (Anwar, 2006:

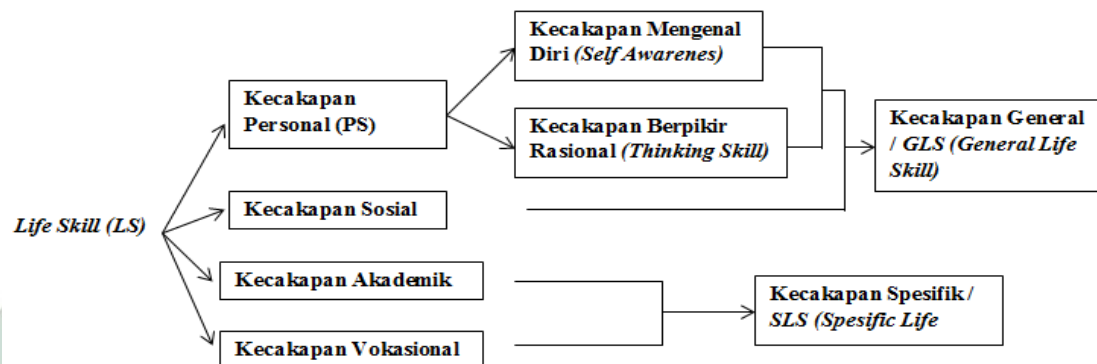
[illegible]

28). Sementara itu menurut Asmani(2009: 37), pendidikan kecakapan hidup dapat dipilah menjadi dua jenis utama, yaitu:

- a. **Kecakapan Hidup General (*General Life Skill/GLS*).**

Kecakapan Hidup Spesifik (*Specific Life Skill/SLs*).

**Gambar 1. Skema Terinci *Life Skill***



- a. **Kecakapan Hidup General (General Life Skill/GLS)**

Kecakapan hidup general (general life skill/GLS) merupakankecakapan yang diperlukan semua orang, baik mereka yang bekerja,belum bekerja, tidak bekerja maupun mereka yang masih menempuhipendidikan, (Sukidjo, 2003: 431). GLS dibagi menjadi: kecakapanmengenal diri (personal skill), kecakapan berpikir rasional (thinkingskill), kecakapan sosial (social skill).

- ### 1) Kecakapan Mengenal Diri

Siti Irene Astuti D (2003: 26) menyatakan bahwa kecakapan mengenal diri (*self awarness*) atau kecakapan personal (*personal skill*) mencakup:





Kesadaran diri menciptakan proses internalisasi dari informasi yang diterima yang pada saatnya menjadi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan diwujudkan menjadi perilaku keseharian. Oleh karena itu, walaupun kesadaran diri lebih merupakan sikap, namun diperlukan kecakapan untuk menginternalisasi informasi menjadi nilai-nilai dan kemudian mewujudkan menjadi perilaku keseharian (Asmani, 2009: 39-40).

“Pada dasarnya, kecakapan berpikir merupakan kecakapan menggunakan pikiran/rasio secara optimal” (Asmani, 2009: 44).Kecakapan berpikir mencakup:



a) Kecakapan komunikasi dengan empati (*communication skill*)

b) Kecakapan bekerjasama (*collaboration skill*)

Kecakapan bekerjasama sangat diperlukan, karena sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu bekerjasama dengan manusia lain. Kerja sama bukan sekedar “kerja bersama”, tetapi kerjasama yang disertai dengan saling pengertian, saling menghargai, dan saling membantu (Asmani, 2009: 50).

Adalah kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu. Kecakapan ini terdiri dari kecakapan akademik atau kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional. Kecakapan akademik terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran atau kerja intelektual. Sedangkan kecakapan vokasional

terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan keterampilan motorik.<sup>28</sup>





## Skills

dan sebagainya), nilai tambah dan kebahagiaan.

di maksud ini identik dengan apa yang dinamakan *Life Skills*. Dengan





Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan *Life Skills* berbasis nilai-nilai budaya islami merupakan sebuah kebutuhan dalam membentuk karakter anak didik sesuai dengan misi pendidikan, terutama pembentukan peserta didik yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kebutuhan-kebutuhan tersebut terwujud melalui prinsip-prinsip belajar yang menyertakan nilai ilmiah, akhlak dan

